

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah pendidikan merupakan suatu hal yang sangatlah penting dan urgen dalam perkembangan suatu bangsa. Demikian pula halnya dengan di Indonesia, yang juga memberikan ruang dan tempat yang khusus dalam hal pendidikan, ini dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 dan pada pasal yang mengatur tentang pendidikan tersebut, yaitu pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Demikian pula dengan isi dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Deklarasi Hak Azasi Manusia yang mencantumkan akan pengharusan terhadap dilaksanakannya pendidikan bagi setiap manusia seperti yang tertuang dalam pasal-pasal antara lain pada pasal 26 ayat (1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran, pengajaran harus percuma, setidaknya dalam tingkatan sekolah terendah / tingkat dasar. Pengajaran sekolah dasar harus diwajibkan, pengajaran tehnik dan vak harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kecerdasannya. Pasal 26 ayat (2) Pengajaran harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima serta rasa persahabatan antara sesama bangsa, golongan-golongan kebangsaan / golongan penganut agama, serta harus memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) dalam memelihara perdamaian. Pasal 26 ayat (3) Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Jadi disini terlihat sangatlah jelas bahwa masalah pendidikan itu berlaku secara global dan menjadi sesuatu hal yang sangatlah penting didalam kehidupan dan menjadi hak asasi bagi setiap manusia untuk mencicipinya. Kewajiban dari satu negara untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga negaranya adalah sangat mutlak dan dilakukan dengan menggunakan dan menyesuaikan sistem pengajaran untuk negara-negara yang berbeda sesuai dengan tujuan pendidikan dan program rencana pembangunan dari negara tersebut yang kemudian disusun dalam rancangan yang sistematis dan terarah. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mencantumkan tujuan daripada pendidikan secara nasional yang tertuang dalam pasal 4 yaitu :

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Maka berdasarkan hal itulah maka menjadi landasan dari tujuan pendidikan secara nasional, yang mana pendidikan nasional memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, karena itu didalam penerimaan para peserta didik tidak dibenarkan akan adanya perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, tingkatan sosial serta ekonomi. Kemudian secara teknis dan dibuat secara sistematis program-program operasionalnya untuk dilaksanakan. Dalam hal tujuan pendidikan nasional Indonesia secara institusional dituangkan dalam kurikulum dan kemudian

dijabarkan dalam Garis Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) serta pelaksanaan dan operasionalnya adalah dilaksanakan disekolah dalam suatu kegiatan yang lazim disebut dengan proses belajar mengajar, yang dalam hal ini siswa dan guru sebagai salah satu subjek daripada proses belajar mengajar tersebut mempunyai target yang harus dicapai sesuai dengan GBPP tersebut. Demikian pula halnya dengan pengajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang disingkat P-IPS.

GBPP IPS adalah merupakan salah satu dari perangkat kurikulum yang menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya di sekolah dalam bidang pelajaran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Menurut Somantri N (2001:44) mengemukakan : “tujuan dari pendidikan IPS untuk tingkat sekolah itu sebagai suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi, filsafat, ideologi negara dan agama yang di organisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”. Sedangkan menurut Nasution dalam Buchari Alma (1987:196) mengungkapkan :

“ Ilmu Pengetahuan Sosial ialah suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam fisik maupun lingkungan sosialnya dan yang bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti geografi, sejarah, antropologi, sosiologi, politik, dan psikologi”.

Begitu pula dengan Jhon Jarolimek (1967:4) yang mengungkapkan tentang sosial studi yaitu bahwa :

*“The social studies as a part of the elementary school curriculum draw subject matter content from the social sciences, history, sociology, political science, social psychology, philosophy, anthropology and economic. The social studies have been defined as those portion of the social science ..... selected for instructional purpose”.*

Sedangkan mengenai bahan kajian P-IPS tersebut yang kemudian diorganisasikan mulai dari bahan pelajaran yang dekat dan sederhana yang ada disekitar anak, sehingga anak dapat dengan cepat dapat mencerna dan memahami apa yang diajarkan pada pelajaran tersebut. Sementara tujuan terpenting dan essensi daripada pengajaran pendidikan IPS adalah menjadikan manusia dan warga negara yang baik. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar guru dalam hal ini hendaknya menerapkan prinsip siswa yang aktif dimana keterlibatan siswa baik secara fisik, mental maupun sosial sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa visi pendidikan IPS adalah membentuk sikap, kepribadian dan prilaku siswa agar dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab yang dapat membedakan antara sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya serta yang menjadi hak dan kewajiban orang lain dalam konteks etika dan moral dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan dalam hal prakteknya misi dari pendidikan IPS adalah menanamkan pendidikan nilai, moral, etika dan sikap berbudi luhur serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada siswa agar mereka dapat menjadi seorang warga negara yang baik, serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya dalam kehidupannya sehari-hari berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam usaha untuk menciptakan manusia sebagai warga negara yang baik tersebut, yang apabila dilakukan pada kondisi yang umum atau biasa, bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang harus dapat diwujudkan atau direalisasikan,

lain halnya dengan para siswa yang telah dan pernah mengalami situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan seperti siswa yang sebelumnya telah mengalami suatu peristiwa yang sangatlah traumatis yang menimbulkan dampak psikologis yang sangat tidak baik, seperti yang dialami oleh para siswa yang menjadi korban dari kerusuhan di Kabupaten Sambas yang terjadi pada awal Maret 1999 yang merupakan kerusuhan sosial yang berakar pada masalah etnis (*culture lag*) sehingga mengakibatkan pengungsian secara besar-besaran sekarang ini ditempatkan pada lokasi penampungan pengungsi yang menyebar di berbagai wilayah di Propinsi Kalimantan Barat, seperti di Kotamadya Pontianak, Kotamadya Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Sampai sekarang ini pengungsi korban Paska Kerusuhan Sosial Sambas (PKSS) berjumlah kurang lebih 3500 kepala keluarga (KK) atau kurang lebih 9500 orang tersebut (data statistik sosial 2000, Kal-Bar), pada umumnya terdiri dari orang tua dan anak-anak itu belum tertangani dengan baik. Dalam hal masalah pendidikan yang merupakan suatu hal yang penting dimana dunia pendidikan dapat memerankan peranan yang sangat penting disamping hal hal lain bagi anak-anak yang berusia sekolah (7 – 19 tahun) yang apabila tidak tertangani dengan baik, dapat dipastikan akan mengakibatkan dampak pada rendahnya sumber daya manusia itu kelak, yang apabila hal ini dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak dengan kehilangan suatu generasi (*lost generation*) di Kalimantan Barat. Menurut Gaffar (1997), “Garapan pendidikan diyakini sebagai instrumen yang ampuh guna membangun dan membina pemahaman dan kesadaran nasional serta menunjukkan derajat toleransi yang kental antara sesama masyarakat Indonesia”.

Untuk itu telah dilakukan upaya mencegah agar anak usia sekolah pada anak pengungsi untuk mendapatkan pendidikan yang layak maka dilakukanlah upaya dengan menitipkan anak-anak tersebut pada sekolah-sekolah yang berada disekitar lokasi pengungsian. Dari jumlah anak usia sekolah berusia 7-19 tahun berjumlah total 1063 orang, yang bersekolah dasar (SD) berjumlah 755 orang, SLTP berjumlah 283 orang, sedangkan yang SLTA berjumlah 25 orang. Berdasarkan jumlah diatas tingkat usia SD-lah yang terbesar, hal ini sangatlah ironis jika dibandingkan dengan jumlah total dari pengungsi yang berada di Kota Pontianak yang berjumlah 15.579 jiwa dan yang berada di Kabupaten Pontianak berjumlah kurang lebih 3.700 orang, Sedangkan jumlah pengungsi yang berada di Kotamadya Singkawang sekarang ini berjumlah kurang lebih 9000 jiwa, yang ditempatkan tepatnya di Desa Bomakaang Kecamatan Singkawang Selatan dan selebihnya tinggal menyebar diseputar wilayah Kotamadya Singkawang (Depdiknas:2000) . Sedangkan pada umumnya yang paling banyak menjadi pengungsi adalah anak anak dan orang tua, sehingga diperlukan adanya upaya untuk terus melangsungkan proses dari pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang sempat tertunda dikarenakan adanya kerusuhan tersebut pada daerah lokasi pengungsian.

Oleh karena siswa yang mengikuti proses belajar mengajar sebelumnya mengalami dan memiliki latar belakang psikologis yang kurang menguntungkan, maka diperlukan upaya dan perlakuan khusus bagi para siswa tersebut, dengan adanya upaya khusus tersebut diharapkan dapat menciptakan manusia atau siswa yang berkelakuan dan berperilaku yang baik yang akhirnya diharapkan menjadi

warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini mengingat interaksi sosial dari siswa yang merupakan korban PKSS disekolah memerlukan adaptasi terhadap lingkungan sekolah dan aspek psikologis yang berbeda dengan siswa lainnya. Oleh sebab itulah dalam pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar terjadi sebuah konsep interaksi sosial disekolah dapat berjalan dan berlangsung dengan baik antara siswa korban PKSS dengan sekolah, guru dan dengan siswa lainnya. Serta hendaknya lebih diupayakan pembelajaran yang sifatnya lebih humanisme dan empati dalam proses pembelajaran khususnya pendidikan IPS selain disamping ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Interaksi sosial para siswa korban PKSS adalah merupakan sebuah proses yang sangatlah diperlukan dalam proses pembelajaran pendidikan IPS tersebut, dimana dengan demikian akan terjadi perubahan yang cukup nyata dalam lingkungan kehidupannya sehingga dapat terjadi penyesuaian dan adaptasi terhadap diri pada siswa korban PKSS dengan lingkungan sekolahnya secara aktif maupun pasif. Sedangkan menurut H. Bonner (1953;3) mengemukakan bahwa :“Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya”.

Interaksi sosial yang terjadi dan sangatlah diharapkan dalam proses belajar mengajar (sekolah) maupun diluar demi berlangsungnya pendidikan yang banyak terdapat aspek-aspek lainnya. Interaksi baik antar individu (siswa) dengan siswa, siswa dengan kelompok ataupun kelompok siswa dengan kelompok siswa lainnya



dapat berjalan dengan lancar akan tetapi dapat juga tidak berjalan dengan lancar.

Hubungan akan lancar terjadi apabila masing-masing pihak memiliki penafsiran yang sama atas pola tingkah lakunya, dalam suatu struktur kelompok sosial. Masing-masing pihak telah mempelajari perangsangan ataupun stimulus dan respon mana yang harus dipilih dan dihindari tergantung akan aksi yang dihadapi ataupun reaksi yang harus diberikan. Demikianlah pula halnya dengan para siswa Pengungsi Kerusuhan Sosial Sambas, yang maka kita singkat saja dengan PKSS, dimana dapat terlihat adanya tekanan psikologis dan mental yang sangat besar dan berat. Maka hal ini diperlukan suatu upaya sehingga mereka dapat menerima hal hal telah terjadi tersebut dengan cepat melupakannya dan mengesyampingkan perbedaaan dan friksi-friksi yang telah terjadi sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dari pada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Meskipun kita mengetahui bahwa tujuan yang esensi daripada pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial adalah menciptakan warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta berbudi luhur yang dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku serta dapat memecahkan masalah sosial pada masa yang akan datang. Hal ini dapat tercipta bila mana yang dihadapi adalah dengan latar belakang kondisi yang kondusif , sedangkan kondisi yang dilatar belakangi berbagai masalah atau konflik dan yang relatif tidak mendukung diperlukan upaya yang sangat penting untuk menumbuhkan dan menyembuhkan luka-luka psikologis dan mental yang sangat dalam itu telah dialami mereka siswa-siswa pengungsi korban kerusuhan sosial Sambas sehingga mereka dapat berinteraksi dan bersosialisasi disekolah pada khususnya maupun di lingkungan sekitar

mereka pada umumnya. Dimana diusahakan dan di upayakan secara maksimal untuk mengembalikan kondisi psikologis siswa-siswa itu agar tetap dapat mendapatkan dan menikmati pendidikan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pasal 31 ayat (1) serta untuk mencegah terjadinya “lost generations” serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, serta berupaya meminimalisir perasaan dendam dan beban psikologis lainnya. Sehingga mereka kelak dapat menjadi warga negara yang baik yang mana dapat menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan di masyarakat sekitar mereka serta dapat mencegah dan meminimalisir perselisihan dan konflik di masyarakat pada masa-masa yang akan datang seperti yang menjadi tujuan dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa upaya yang dilakukan merupakan usaha yang sangatlah berat dimana dimasyarakat pada umumnya serta pada siswa pelajar pada khususnya masih menyimpan perasaan sakit hati terhadap sesamanya dimana tertanam “*stereotype*” atau pandangan yang negatif terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang hanya berdasarkan hanya dari suatu sudut pandang saja sangatlah kuat tertanam di masyarakat umumnya dan pada siswa pada khususnya serta ditambah dengan masih terjadinya percikan-percikan kecil perselisihan atau konflik diantara kedua etnis hingga sekarang ini tersebut sehingga menambah semakin pelik dan rumitnya persoalan yang dihadapi itu, akan tetapi didalam upaya tersebut dengan menjaga dan saling berinteraksi sosial yang baik pada masing-masing pihak yang dalam masalah ini siswa sehingga diharapkan



dapat memupus dan menghilangkan permasalahan dan persoalan yang timbul itu dan dapat bersosialisasi dan berinteraksi secara baik dengan lingkungan dan masyarakat tanpa adanya perasaan berbeda dan tertekan atau rendah diri dalam berinteraksi dengan sesamanya maupun lingkungan pada umumnya. Dengan cara diarahkan serta dibimbing oleh para guru, kepala sekolah dan para pembina yang berasal lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan nasional.

Interaksi sosial yang merupakan salah satu bentuk hubungan antar individu manusia dengan lingkungannya, khususnya lingkungan psikisnya lebih ditekankan pada usaha penyesuaian diri dengan lingkungannya dimana dalam hal ini individu yang pertama menyesuaikan dirinya dengan individu yang lainnya dan yang lain terhadap individu yang pertama. Akan tetapi diperlukan pula adanya situasi sosial yang mana tiap interaksi sosial maka terjadi pula apa yang disebut dengan situasi sosial.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

### **1. Masalah secara umum**

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah utama yang diajukan adalah “Bagaimanakah interaksi sosial siswa dalam upaya membina warga negara yang baik pada pengungsi korban pasca kerusuhan sosial Sambas (PPKS) di Kelas VI Sekolah Dasar Negeri di Desa Bomakaang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang ?

## **2. Masalah secara khusus**

- a. Bagaimanakah proses interaksi sosial siswa korban paska kerusuhan sosial Sambas (PPKS), pada Sekolah Dasar kelas VI di Desa Bomakaang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dalam kaitan dengan proses belajar mengajar dikelas, antara lain :
  1. Diskusi.
  2. Kerja kelompok
- b. Bagaimanakah proses interaksi sosial siswa korban paska kerusuhan sosial Sambas (PPKS) dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah pada Sekolah Dasar kelas VI di Desa Bomakaang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang , antara lain : Pramuka
- c. Bagaimanakah proses interaksi sosial siswa korban paska kerusuhan sosial Sambas (PPKS) pada Sekolah Dasar kelas VI di Desa Bomakaang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan siswa lainnya pada waktu beristirahat ?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### ***a. Tujuan penelitian umum***

Penelitian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk memperoleh informasi deskriptif tentang keadaan perkembangan interaksi sosial siswa pengungsi korban paska kerusuhan sosial Sambas (PPKS) di Desa Bomakaang, Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan untuk mengetahui perkembangan interaksi sosial siswa dalam aktifitasnya di lingkungan pada

Sekolah Dasar kelas VI di Desa Bomakaang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang .

**b. Tujuan Khusus**

Seperti yang telah disebutkan pada latar belakang penelitian ini, bahwa salah satu hambatan dari interaksi sosial pada siswa korban paska kerusuhan sosial Sambas (PPKS) di kelas karena masih adanya beban mental/psikologis dan perasaan traumatik yang timbul akibat merupakan dampak daripada kerusuhan tersebut, sehingga menimbulkan kurang mampunya siswa untuk berinteraksi sosial dan beradaptasi terhadap lingkungannya di sekolah secara umumnya. Oleh sebab itulah penelitian ini bertujuan secara khusus untuk mengamati secara langsung atau secara klasikal melakukan observasi baik pada siswa korban paska kerusuhan sosial Sambas (PPKS) pada Guru maupun siswa lainnya.

Berdasarkan paparan diatas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan khusus, sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui kemampuan siswa pengungsi korban PKSS dalam berinteraksi sosial dalam proses belajar mengajar antara lain dalam berdiskusi, kerja kelompok dan bertanya / menjawab pertanyaan dalam upaya membina warga negara yang baik di kelas VI pada Sekolah Dasar Negeri No. 6 di Desa Bomakaang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang .
- 2) Untuk mengetahui gambaran kemampuan siswa korban PKSS dalam berinteraksi sosial melalui kegiatan ekstra kurikuler yang diantaranya kegiatan pramuka, dalam upaya membina warga negara yang baik di kelas

VI Sekolah Dasar Negeri di Desa Bomakaang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang .

- 3) Untuk mengetahui kemampuan siswa korban PKSS dalam berinteraksi sosial pada waktu istirahat siswa kelas VI di Sekolah Dasar Negeri di Desa Bomakaang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para guru sekolah dasar, lembaga pendidikan serta lembaga yang terkait lainnya dalam pelaksanaan pendidikan selain itu juga kegunaan penelitian itu bisa untuk peneliti sendiri ataupun yang menjadi objek penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bahan masukan bagi sekolah penyelenggara dalam melaksanakan strategi pembelajaran di Kelas VI di sekolah dasar yang mempunyai siswa korban PKSS tersebut untuk dapat mengkondisikan upaya untuk dapat terjadinya interaksi sosial yang baik seperti apa yang merupakan tujuan pembelajaran pendidikan IPS itu sendiri yaitu menjadi masyarakat atau warga negara yang baik.
2. Memberikan bahan masukan bagi para guru sehingga tercapai sasaran dan tujuan daripada pendidikan sebagai alat transformasi nilai sosial budaya yang baik dan luhur dalam kehidupan para siswa terutama siswa korban paska kerusuhan sosial Sambas (PKSS).
3. Dari penelitian ini, diharapkan penulis dapat dan mampu mengembangkan pola pengajaran yang efektif dan tepat untuk diterapkan dilingkungan

Sekolah Dasar, khususnya pada siswa korban PKSS di Desa Bomakaang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang .

4. Dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan solusi yang berguna bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Barat beserta Instansi yang terkait dalam upaya penanggulangan masalah pendidikan khususnya bagi pengungsi korban kerusuhan sosial Sambas yang ada di Kalimantan Barat.

## **D. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Interaksi Sosial.**

Dalam kehidupan dimasyarakat, tidaklah dapat dibantah bahwa tidak ada satupun individu dari anggota masyarakat yang dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan individu yang lain, hal ini merupakan hal yang sangat mendasar dimana manusia merupakan mahluk social (zoon politicoon), yang berarti bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat hidup tanpa adanya bantuan dan hubungan manusia lainnya. Dengan adanya hubungan ini dimana seseorang individu selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dapat dan mampu bertahan atau eksis didalam lingkungan itu sebagai bagian dari anggota dari kelompok masyarakat tersebut. hubungan yang terjadi di antara satu individu dengan individu yang lainnya di dalam masyarakat dimana terjadi saling mempengaruhi, merubah ataupun memperbaiki tindakan dan prilaku individu yang lain itu disebut dengan interaksi sosial. Sedangkan menurut H. Bonner (1953;3) mengemukakan bahwa : “Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, dimana individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki

kelakukan individu yang lain, ataupun sebaliknya”. Menurut Young dan Raymond (1957:137) mengemukakan pendapatnya tentang interaksi sosial adalah “ Interaksi sosial adalah kunci daripada semua kehidupan sosial, oleh karena itu tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama”. Sedangkan dalam proses belajar mengajar dimana didalam sebuah lembaga atau sekolah juga sangatlah memerlukan adanya interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa ataupun guru dengan kepala sekolah, staf, pembina kegiatan ekstrakurikuler maupun orang tua murid. Begitu juga dengan Adiwikarta (1988;102) : “ Interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa serta interaksi antara siswa dengan siswa lainnya di kelas berpengaruh besar terhadap hasil belajar, interaksi atau saling berhubungan dan saling pengaruhi antar sesama warga suatu kelompok, dalam hal ini di kelas melahirkan apa yang dinamakan iklim atau suasana kelas”.

Dalam hal ini begitu pentingnya interaksi siswa dikelas, yang secara langsung memberikan dampak yang baik bagi perkembangan mental dan psikologis siswa pengungsi. Interaksi sosial siswa dengan siswa serta siswa dengan guru yang dilakukan dalam bentuk interaksi edukatif. Berdasarkan pendapat para ahli bahwa interaksi sosial merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua individu dikarenakan sebagai manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dalam kehidupannya serta perubahan yang terjadi disekitar manusia seperti lingkungan sendiri menuntut manusia untuk dapat beradaptasi dan berinteraksi dengannya.

## 2. Warga Negara

Pengertian terhadap arti daripada warga negara pada umumnya berarti orang yang tinggal di suatu negara dan diakui oleh negara. Dalam Undang-Undang no 1962/tahun 1958 yang mengatur tentang Kewarganegaraan dan Keimigrasian menentukan tentang Warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan / atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17- Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk lebih jelas dan mendetail mengenai warga negara terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang warga negara adalah antara lain pada :

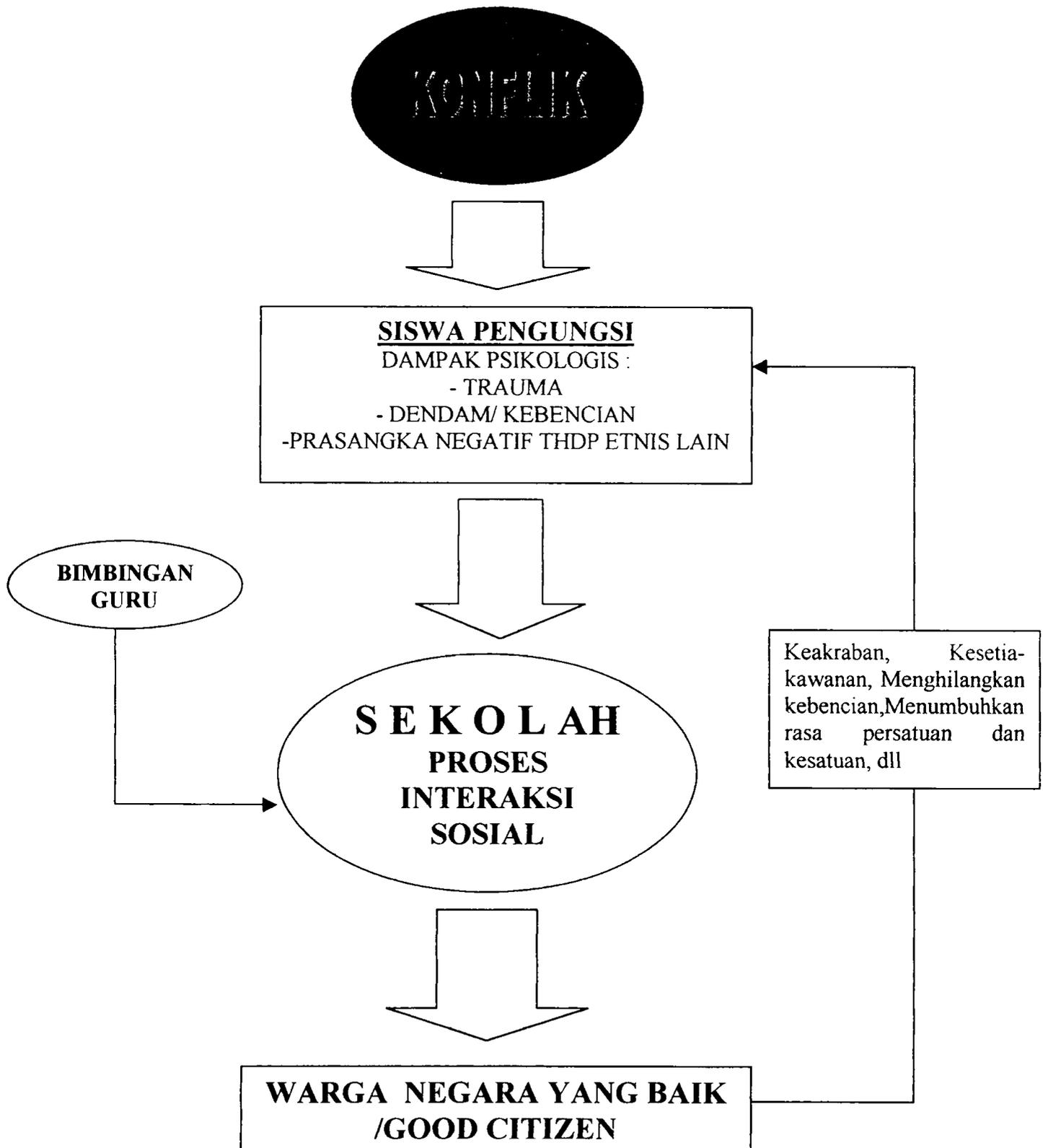
- a) Pasal 26 ayat (1) menyatakan : Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b) Pasal 26 ayat (2) menyatakan : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
- c) Pasal 27 ayat (1) menyatakan : Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- d) Pasal 27 ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- e) Pasal 28 menyatakan : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

- f) Pasal 31 ayat (1) menyatakan : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
- g) Pasal 31 ayat (2) menyatakan : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Sedangkan segala jenis hubungan yang terjadi antara seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan disebut juga dengan istilah Kewarganegaraan (Soetoprawiro,K:1996:7). Dalam hal ini seorang warga negara yang baik itu adalah seseorang yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, menganut keyakinan tertentu dan dapat menyesuaikan diri pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan juga mampu beradaptasi dan berperan serta dalam lingkungannya. Robert Barr,cs dalam Buchari Alina (1987:29) menyatakan :

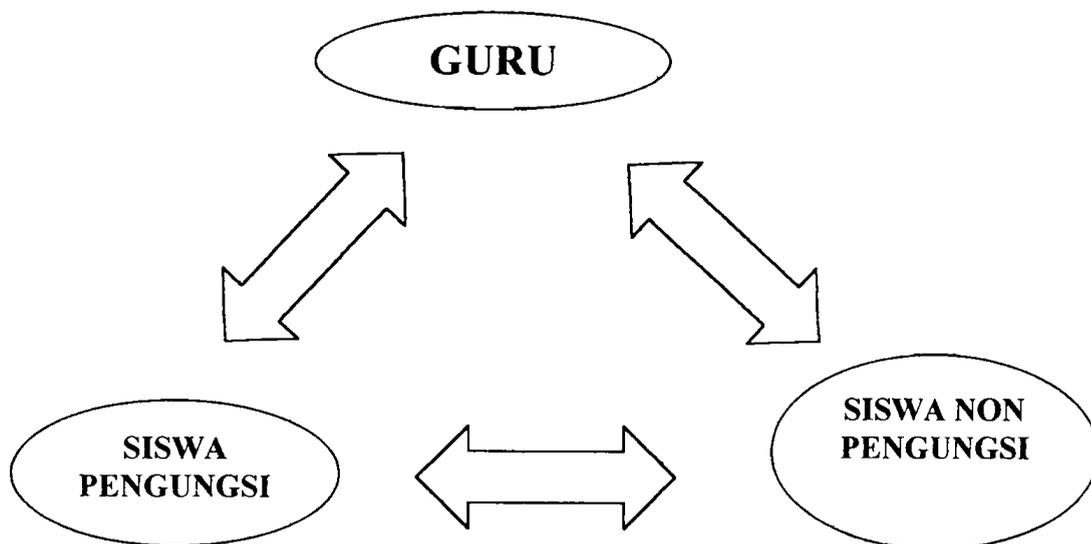
“warga negara yang baik ialah warga negara yang telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagai warga negara. Warga negara yang baik adalah anggota yang baik dalam bangsa amerika, warga negara yang baik berarti warga negara itu mematuhi hukum, membayar pajak .....warga negara yang baik mau mempertahankan /membela tanah airnya”.

**E. ALUR KERANGKA PEMIKIRAN.**



## INTERAKSI YANG TERJADI DI KELAS

Gambar 2.a : Interaksi antara guru dan siswa



Gambar 2.b : Interaksi antara siswa dengan siswa

